



Komunitas Warga Kalibata City

Kalibata Residence Jl. TMP Kalibata Raya No.1 RT 012/004 Kelurahan Rawajati Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan | Alamat surat: Jl. Mampang Prapatan X No. 35 Jakarta Selatan 12790 | Fax: 021-79184892 | Email: kotakalibata@gmail.com; informasi@kalibatacity.or.id; support@kalibatacity.or.id | Twitter: [@kotakalibata](https://twitter.com/kotakalibata) | Milis: kotakalibata@yahoogroups.com | Web: <http://kalibatacity.or.id> | Fanpage/Facebook Group/YouTube: Komunitas Warga Kalibata City | No. rekening 7253007700 BTN Syariah a.n. Komunitas Warga Kalibata City Kode Bank 200 | Call center: +62 897-8556-010; +62 812-9230-637; +62 813-1923-4576; +62 819-0824-9249; +62 817-847-653; +62 855-8876-000

Siaran Pers – Untuk Diterbitkan Segera Aksi Damai Kalibata City Bersama 36 Rumah Susun se-DKI Jakarta di KPK Sekaligus Pengaduan Dugaan Korupsi Rusun

Jakarta, 8 April 2016 – Siaran pers KWKC 2 April lalu <http://bit.ly/1ViR99E> yang menceritakan kegembiraan warga Kalibata City atas tertangkapnya Presdir Agung Podomoro rupanya menularkan kegembiraan juga ke rusun lainnya. Kegembiraan yang secara cepat berubah menjadi energi baru untuk bersama-sama bangkit dan berjuang kembali. Para pegiat rusun yang juga tergabung dalam Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun Indonesia (KAPPRI) menjadikan momentum tersebut sebagai media untuk mengungkap dugaan korupsi rusun ke publik secara luas. Gayungpun tersambut, hari ini sebanyak 36 rusun bergabung untuk melakukan aksi damai bersama-sama sekaligus menyampaikan pengaduan berikut bukti-bukti pendukung ke KPK.

Ade Tedjo, Ketua PPPSRS (Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun) versi warga sekaligus koordinator rombongan dari Kalibata City menjelaskan “Kami akan memanfaatkan momentum ini semaksimal mungkin dengan melakukan konsolidasi intensif dengan berbagai pihak yang berkepentingan” Ade Tedjo menambahkan “Aksi damai ke KPK adalah pintu masuk untuk membuat publik cukup *aware* bahwa terdapat persoalan pelik di rusun yang diduga menyangkut korupsi dalam berbagai bentuk oleh pengembang dan dugaan suap dan gratifikasi kepada pejabat publik dengan berbagai modus” “Tulisan yang ada dalam spanduk-spanduk yang kami bawa ini adalah materi aksi damai kami tahun lalu di Kalibata City, artinya dari tahun lalu sampai sekarang, kami masih mengalami ketidakadilan, bahkan lebih parah padahal warga sudah berjuang sejak 2011” Tedjo, panggilan akrabnya, melanjutkan “Bisa dibayangkan bagaimana tersiksanya para pemilik yang sekaligus menjadi penghuni rusun hingga hari ini”

Dugaan korupsi dan suap tersebut indikasinya sangat kuat, Bambang S, juru bicara KWKC menjelaskan “Dari kasus penyusunan oleh AWJ ini, pihak berwenang maupun publik tentunya menjadi lebih paham bagaimana tradisi Agung Podomoro dalam menjalankan bisnisnya di Indonesia. Misalnya praktik-praktik yang bisa kita evaluasi bersama seperti bagaimana mungkin pengembang bisa menjual sebelum Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) diurus dan belum ada bangunan fisiknya. Lalu bisa membangun tanpa IMB dan persyaratan lainnya. Kemudian bisa menyerahkan satuan rumah susun (sarusun) sebelum ada Sertifikat Laik Fungsi (SLF)” Bambang melanjutkan “Nah, dari sini publik nampaknya sudah bisa menduga-duga bagaimana mungkin semua itu dapat

dilakukan jika tidak ada perlindungan dari pejabat terkait? Lalu mengapa pejabat terkait tutup mata atas berbagai dugaan penyimpangan tersebut?”

Wewen Zie, juru bicara lainnya mengungkapkan “Tidak ada laporan keuangan yang diaudit dan transparan atas iuran pemeliharaan lingkungan dan *sinking fund* yang dihimpun dari warga membuat kami khawatir ada penyelewengan dalam berbagai bentuk termasuk dugaan penggelapan.” Wewen menambahkan, “Juga banyak fasilitas sosial dan fasilitas umum di Kalibata City yang dikomersialkan tanpa ada laporan dari pengelola. Ini merupakan pelanggaran dari hak warga dan juga pelanggaran ketentuan perundang-undangan.” “Semua persoalan di atas telah dilaporkan ke Pemprov DKI, namun hingga hari ini belum ada tindakan nyata.” Wewen menambahkan “UU 20/2011 tentang Rumah Susun menyatakan bahwa pembinaan penyelenggaraan rumah susun dilaksanakan oleh pemerintah (pasal 5 ayat 1) yakni oleh Gubernur pada tingkat provinsi (ayat 2 huruf b). Oleh karena itu, Gubernur hendaknya tidak mendiamkan permasalahan-permasalahan tersebut berlarut-larut.”

Aksi damai ini dihadiri oleh rusun se-DKI antara lain: Maple Park, East Park, Green Pramuka City, Bellezza, Menara Cawang, Gading Nias Residence, Palace residences, Gading Mediteranian, Palace, Menara Latumeten, Pancoran River Side, Kalibata City, Kenari Mas, Mediterania Marina Ancol, The Lavande Residences, Thamrin city, Pakubuwono, Bintaro Park View, Mediterania Gajah Mada, Green Park view, MEDITERANIA Bloulevard, SAHID, GREEN Bay, Pluit Sea view, Mangga 2 court, Mangga 2 square, Ltc glodok, Teluk intan, The mansion at kemang, Permata Mediterania, Hayam Wuruk, Gading Icon, Graha Cempaka Mas, Mangga 2 Mall, ITC Roxy, Gading Resort/MoI.

Wawancara lebih lanjut dapat menghubungi juru bicara KWKC:

Antonius J. Sitorus 081319234576, Wewen Zie 08558876000, Bambang RS 08129230637, dan Umi Hanik 0817847653.